

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam memproduksi barang dan jasa. Itulah sebabnya tingkat pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diterapkan (Luron, Kumenaung, & Kawung, 2025).

Dalam studi pertumbuhan ekonomi modern, Model Pertumbuhan Solow-Swan, yang diperkenalkan oleh Robert M. Solow dan Trevor Swan, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh Akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah faktor produksi, tetapi juga pada tingkat produktivitas, yang berasal dari kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif pertumbuhan yang dipimpin oleh produktivitas, peningkatan produktivitas penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menggunakan input produksi secara lebih efisien. Oleh karena itu, modal manusia, seperti yang ditunjukkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertindak sebagai katalisator yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Sairmaly, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi suatu wilayah. Penggunaan PDRB ADHK dianggap lebih akurat dalam menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil karena perhitungannya telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Data PDRB ADHK yang disajikan berdasarkan sektor ekonomi dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi dari setiap sektor, tingkat pertumbuhannya, dan perubahan peran setiap sektor dalam struktur ekonomi regional. Oleh karena itu, penggunaan data PDRB ADHK penting dalam studi ekonomi regional. Oleh karena itu, penggunaan data PDRB ADHK penting dalam studi ekonomi regional, terutama untuk mengidentifikasi kekuatan dan tingkat daya saing antar sektor di suatu wilayah tertentu (Eliza *et. al*, 2025).

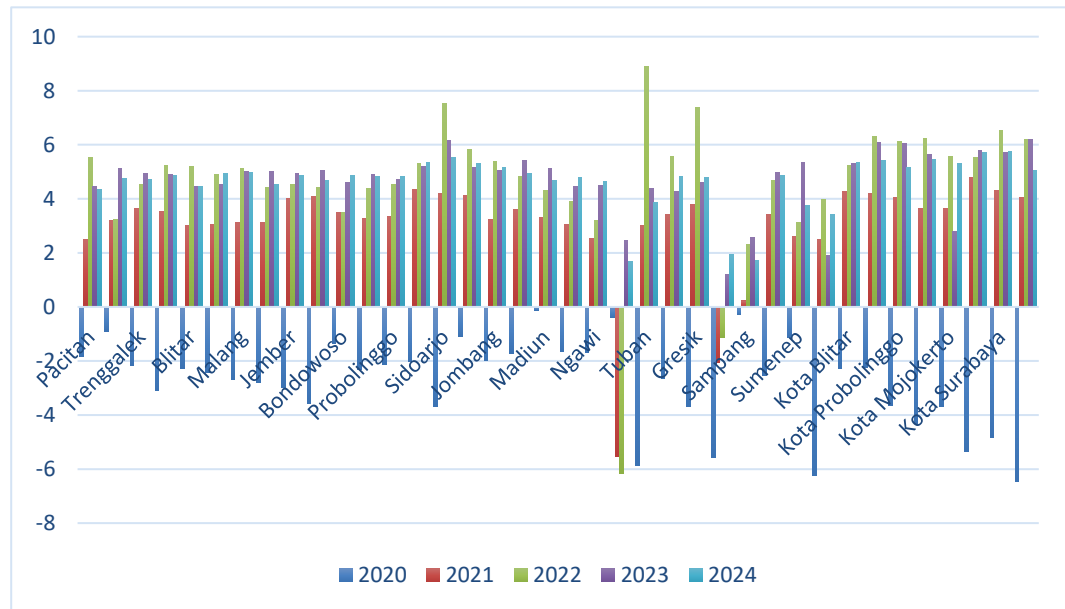
Periode tahun 2020 hingga 2024 menjadi fase yang cukup krusial dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, kondisi ekonomi nasional mengalami kontraksi akibat pandemi *COVID-19* yang berdampak terhadap menurunnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, investasi, serta mobilitas ekonomi di berbagai sektor. Kondisi tersebut turut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Beberapa daerah bahkan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam, seperti Kota Batu sebesar -6,46 persen, Kota Kediri sebesar -6,25 persen, dan Kabupaten Tuban sebesar -5,85 persen.

Pada periode berikutnya, perekonomian mulai mengalami proses perbaikan secara bertahap sejalan dengan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Proses pemulihan tersebut tercermin melalui adanya peningkatan

pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada rentang tahun 2021 hingga 2024. Rentang waktu 2020–2024 tidak hanya menunjukkan dinamika berupa penurunan dan pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi, tetapi juga menggambarkan kapasitas daerah dalam merespons berbagai tekanan serta perubahan kondisi ekonomi. Dalam situasi tersebut, aspek kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang tercermin melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), diperkirakan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap proses pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang besar di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki karakteristik wilayah yang heterogen dengan jumlah administrasi sebanyak 38 kabupaten/kota yang memiliki kondisi ekonomi berbeda-beda. Perbedaan potensi sumber daya daerah, kualitas sumber daya manusia, struktur perekonomian, tingkat industrialisasi, serta tingkat partisipasi tenaga kerja menyebabkan adanya variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih mengalami ketimpangan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk memberikan gambaran empiris terkait dinamika Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1.1, menunjukkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kontraksi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan negatif. Kondisi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara luas, baik pada sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi. Beberapa daerah mengalami kontraksi yang cukup dalam, seperti Kota Batu, Kota Kediri, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah terdampak secara signifikan tanpa terkecuali.

Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan positif di sebagian besar kabupaten/kota. Namun demikian, kondisi yang berbeda terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang justru mengalami kontraksi ekonomi yang cukup signifikan, yaitu sebesar -5,54 persen. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbedaan pola pemulihan ekonomi antar wilayah. Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan menyebabkan perekonomian Kabupaten Bojonegoro lebih sensitif terhadap fluktuasi produksi minyak dan gas bumi (Migas). Akibatnya, dinamika pertumbuhan ekonominya dapat berbeda dengan daerah lain yang struktur ekonominya lebih didominasi oleh sektor industri pengolahan maupun perdagangan.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur mengalami penguatan yang signifikan dan relatif merata. Sebagian besar daerah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan melampaui 6 persen, seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi telah pulih secara lebih optimal, didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat, pemulihan sektor industri, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebagai dampak dari semakin membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat pascapandemi COVID-19. Peningkatan tersebut didukung oleh mulai pulihnya sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa, serta meningkatnya mobilitas dan aktivitas konsumsi masyarakat.

Meskipun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota masih menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Beberapa daerah, seperti Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, terdapat beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan ekonomi masih berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan struktur perekonomian wilayah.

Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara umum masih berada dalam kondisi positif. Namun demikian, pada beberapa daerah terlihat adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi daerah belum sepenuhnya berlangsung secara merata. Beberapa wilayah seperti Kota Surabaya dan Kota Madiun masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik karena didukung oleh aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor industri yang relatif berkembang. Sementara itu, beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bojonegoro dan sejumlah wilayah lainnya, masih menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Provinsi Jawa Timur masih dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Secara keseluruhan, data pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi *COVID-19* yang berdampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2022 kondisi perekonomian mulai mengalami pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar kabupaten/kota. Memasuki tahun 2023 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antarwilayah. Beberapa daerah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan beberapa wilayah lainnya masih menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, seperti Kabupaten Bojonegoro. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Timur belum berlangsung secara merata sehingga masih terdapat ketimpangan atau disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Perbedaan dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan struktur perekonomian daerah maupun kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang tercermin melalui Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) juga dianggap memiliki peranan dalam mendorong peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi daerah.

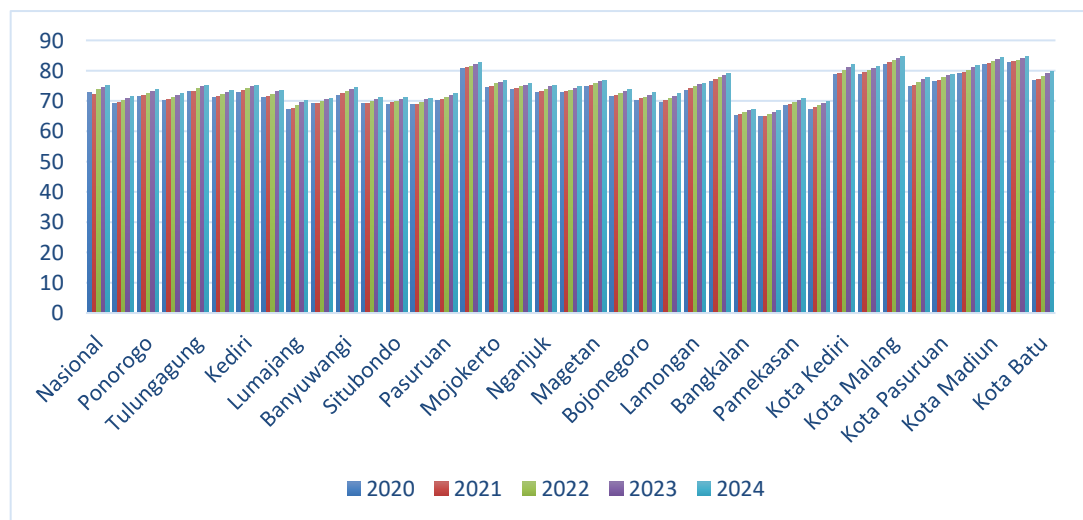
Teori Pertumbuhan Endogen menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting yang berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun regional. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dipandang sebagai bentuk investasi dalam modal manusia (*human capital*) yang berperan dalam memperkuat kemampuan produksi dan meningkatkan daya saing suatu wilayah. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu indikator komposit yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak (Margono & Nuryadin, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang banyak dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Nilai IPM menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia secara menyeluruh yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang layak (Nashih *et. al*, 2024). Dengan demikian, IPM tidak hanya menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan secara efektif, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi nilai IPM yang dimiliki suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi tersebut selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas

masyarakat dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Astuti & Wijaya, 2024).

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, nilai IPM menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarwilayah. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan dalam kualitas pembangunan manusia, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta standar hidup masyarakat. Variasi tingkat pembangunan manusia tersebut diduga mempengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui IPM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat gambaran perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 serta perbandingannya terhadap nilai IPM nasional. Secara keseluruhan, IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kualitas pembangunan manusia yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan standar hidup yang layak.

Namun demikian, pada awal periode penelitian, yaitu tahun 2020 hingga 2021, peningkatan IPM relatif belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi *COVID-19* yang memberikan tekanan terhadap berbagai aspek pembangunan manusia, seperti terganggunya proses pendidikan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, serta menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, IPM kembali menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten seiring dengan proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024. Secara umum, capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang bervariasi. Sebagian daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan beberapa daerah lainnya telah mencapai bahkan melampaui nilai nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia

mengalami peningkatan secara agregat, pemerataan pembangunan manusia antarwilayah masih belum optimal.

Lebih lanjut, terdapat perbedaan capaian IPM antar kabupaten/kota yang mencerminkan masih adanya kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah perkotaan cenderung memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peluang ekonomi pada masing-masing wilayah.

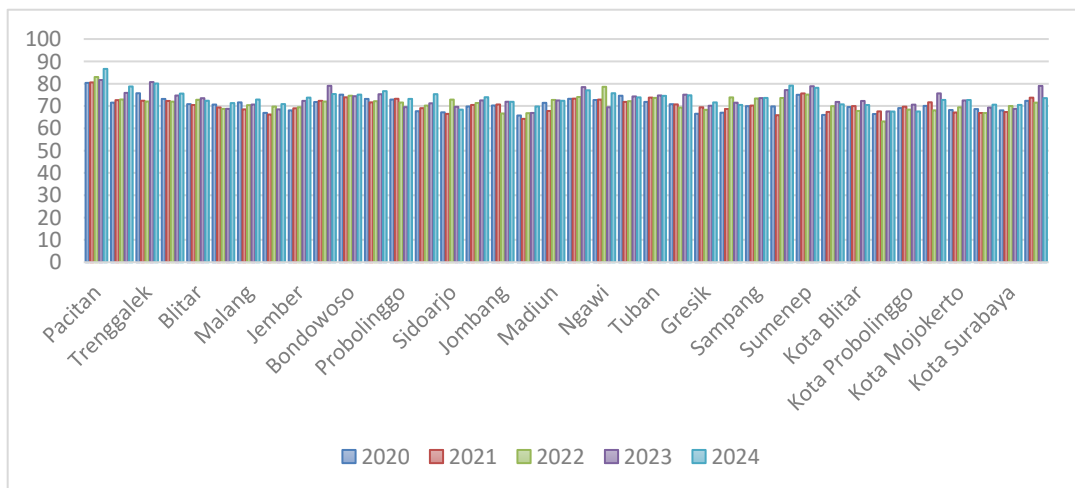
Dengan demikian, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tidak hanya perlu difokuskan pada peningkatan nilai IPM secara agregat, tetapi juga pada upaya pemerataan pembangunan manusia antarwilayah. Hal tersebut menjadi penting mengingat kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor fundamental dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, IPM digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam perekonomian, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan (Margono & Nuryadin, 2024). Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar potensi tenaga kerja yang

terlibat dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan output regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asyari *et. al*, (2024) menyatakan bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau labor force Participation Rate (LFPR) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi dan menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam mendukung proses pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja akan menyebabkan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja sehingga berpotensi mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim (2025)

Berdasarkan gambar 1.3, dapat diketahui perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Secara umum, TPAK pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang berbeda pada setiap tahunnya dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode penelitian. Hal tersebut mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi serta tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Pada awal periode penelitian, yaitu tahun 2020 hingga 2021, TPAK di sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan kondisi yang relatif belum stabil. Fenomena tersebut diduga berkaitan dengan dampak pandemi *COVID-19* yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan menurunnya kesempatan kerja di berbagai sektor. Dampak tersebut berimplikasi terhadap berkurangnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, TPAK pada sebagian besar kabupaten/kota mulai menunjukkan peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pasar tenaga kerja seiring dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pascapandemi. Meningkatnya aktivitas ekonomi turut mendorong bertambahnya kesempatan kerja sehingga partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan data pada gambar 1.3, beberapa daerah menunjukkan tingkat TPAK yang relatif tinggi selama periode penelitian. Kabupaten Pacitan misalnya, mengalami peningkatan TPAK dari 80,36 persen pada tahun 2020 menjadi 86,62 persen pada tahun 2024. Selain itu, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan juga

menunjukkan tingkat TPAK yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja pada daerah tersebut menunjukkan besarnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat TPAK relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kota Malang misalnya, memiliki TPAK sebesar 63,08 persen pada tahun 2022, sedangkan Kota Kediri tercatat sebesar 66 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi pada beberapa daerah masih relatif rendah. Perbedaan tingkat TPAK antarwilayah tersebut mencerminkan adanya variasi kondisi ekonomi, struktur lapangan pekerjaan, serta kemampuan daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Secara umum, perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi selama periode penelitian berlangsung. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja antarwilayah yang menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur masih belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dipilih sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini untuk mengkaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020–2024.

Studi yang dilakukan oleh Margono & Nuryadin (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan” menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 13 wilayah di Kalimantan Selatan tersebut. Secara parsial, TPAK memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, sedangkan IPM memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alkhoiriyah & Sa’roni (2021) juga menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin selama periode 2009-2019. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Luron *et. al.*, (2025) menunjukkan bahwa secara parsial, IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan TPAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta menguji secara empiris pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan kualitas pembangunan manusia serta tingginya keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahuraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (IPK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 hingga 2024. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peningkatan kualitas pembangunan manusia dan partisipasi angkatan kerja yang tinggi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini penting karena pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akumulasi modal dan investasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. IPM, sebagai indikator yang menggabungkan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, kemungkinan besar memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat produktivitas dan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan cara yang sama, IPK menunjukkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam perekonomian, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan output daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar dilakukan di tingkat provinsi atau menggunakan data sebelum pandemi *COVID-19*, penelitian ini secara khusus menggunakan data dari kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 2020–2024, yang mencerminkan fase kontraksi dan pemulihan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih mutakhir tentang dinamika pertumbuhan ekonomi daerah dan peran IPM dan TPAK dalam mendukung proses pemulihan ekonomi.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian ilmiah, khususnya melalui analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel pada tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi keterlibatan angkatan kerja guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari 2 manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara kualitas sumber daya manusia, partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
 2. Memberikan kontribusi empiris terhadap pengujian teori pertumbuhan ekonomi, terutama teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya modal manusia (human capital) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji variabel IPM, TPAK, dan pertumbuhan ekonomi pada lingkup wilayah atau periode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan keterlibatan tenaga kerja. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan mampu mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, berkesinambungan, dan berkelanjutan.
2. Bagi Instansi Terkait : Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai faktor pendorong pembangunan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk mengarahkan fokus analisis secara lebih spesifik penelitian ini penelitian ini terbatas pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),

sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam (persen).

2. Unit analisis penelitian ini mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2020–2024.
4. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antar variabel penelitian.